

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI *REPLANTING* DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERKELANJUTAN

Mohamad Zainuri

Program Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

ABSTRACT

This study aims to understand the empowerment of communities in implementing replanting on sustainable palm oil plantations. The management of oil palm starts from land clearing, planting, maintenance and harvesting and replanting. Replanting is a process of rejuvenation of oil palm crops. the success of replanting depends on the rejuvenation process. While environmentally sound replanting in sustainable palm oil management becomes an important part.

The process of implementing replanting requires community empowerment. The process of community empowerment is done through awareness and community's ability to participate in environmentally sound replanting.

Keywords: replanting, environment, community empowerment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit memiliki umur ekonomis sekitar 25 tahun. Tanaman di atas 20 tahun (tua) dengan produktivitas rendah atau dibawah 13 ton TBS/ha/tahun atau kurang dari 1 ton/ha/bulan (Yulianto, 2016). Kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat pada waktu melakukan upaya *replanting* perkebunan kelapa sawit yang dimiliki.

Replanting atau peremajaan perkebunan kelapa sawit merupakan proses lingkungan tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat. Masyarakat melaksanakan *replanting* untuk melanjutkan usaha perkebunan kelapa sawit. Masyarakat perlu mempersiapkan biaya yang cukup, bibit tanaman kelapa sawit yang berkualitas, ekonomi tanggap tidak terganggu, legalitas lahan dan ekologi lahan yang berkelanjutan.

Tujuan persiapan *replanting* adalah untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat (pendapatan dan lapangan pekerjaan). Proses ekologi, dimana proses *replanting* bertujuan tidak merusak ekologi (produktivitas dan pemulihan ekologi). Proses *replanting* mempertimbangkan kondisi lingkungan yang seimbang yaitu keberlanjutan ekonomi dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi pusat *replanting*. Dimana, masyarakat berperan, merencanakan dan melaksanakan *replanting* perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Masyarakat perlu menyadari dan berpartisipasi serta mempertimbangkan kualitas hidupnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan pemikiran di atas, Penulis selanjutnya merumuskan penelitian bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui *replanting* dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan”.

Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat melaksanakan *replanting* dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan?
2. Mengapa masyarakat perlu berdaya dalam melaksanakan *replanting*?



Tujuan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman pemberdayaan masyarakat melalui replanting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan maksud:

- Menganalisis pelaksanaan replanting perkebunan oleh masyarakat.
- Menganalisis keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan *replanting*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan secara induktif. Penelitian dilakukan dengan tahapan: 1) Pengumpulan data; 2) Pengelolaan; 3) Dianalisis; 4) Kesimpulan.

HASIL

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan *replanting* perkebunan kelapa sawit tergantung kepada petani atau masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat harus berdaya. Keberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan indikator pengetahuan, transfer kekuasaan dan partisipasi masyarakat seimbang.

PEMBAHASAN

Belaksanaan replanting perkebunan oleh masyarakat

Perkebunan kelapa sawit tidak hanya berdampak perbaikan ekonomi seperti di atas. Perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak secara sosial. Aspek tersebut keinginan masyarakat meningkat dalam menanam dan memperluas area kelapa sawit. Hal ini dapat disimak data luas Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dari tahun 2013 berjumlah 2.193.721 Ha menjadi 2.398.328 Ha pada tahun 2015. Dari total luas perkebunan tersebut, perkebunan rakyat (masyarakat) pada tahun 2013 luasnya mencapai 1.348.076 Ha; tahun 2014 seluas 1.408.560 Ha; dan pada tahun 2015 seluas 1.466.881 Ha (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016).

Keinginan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi melalui *replanting* perkebunan kelapa sawit yang telah mencapai umur 25 tahun. Hal tersebut di atas dikarenakan, Kontribusi positif perkebunan kelapa sawit lebih rinci sebagai berikut: 1) Penyediaan tenaga kerja; 2) Meningkatkan pendapatan petani; 3) Akses jalan lebih lancar dan lebih cepat dari satu daerah ke daerah lain; 4) Perusahaan khususnya kebun Ngabang mendapatkan keuntungan 2% dari keuntungan; 5) Perkebunan dapat dijadikan sarana edukasi dalam penanaman kelapa sawit; 6) Mempelopori pembentukan dan pembinaan Koperasi Unit Desa) pada setiap masing-masing kelompok tani; dan 7) Memberikan pendapatan 5% dari hasil penjualan TBS untuk pengurus KUD (Simbolon et. al., 2013).

Permasalahan *replanting* tidak hanya kekurangan biaya tetapi muncul pada saat masyarakat memperluas lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak pertimbangkan kaidah ekologi. Permasalahan tersebut disebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran dan berpartisipasi dalam keberlanjutan lingkungan seperti: masyarakat membuka lahan baru secara mudah, cepat dan murah. Membuka lahan baru tersebut dilakukan dengan cara menebang dan membakar (*slash and burn*). Membuka lahan baru dengan cara membakar berdampak terjadinya kabut asap. Kabut asap memberikan dampak penurunan produktivitas kelapa sawit 0,2-5,5 persen (GAPKI, 2016).

Membuka lahan baru dengan cara membakar sudah dilarang pemerintah. Hal tersebut ditegaskan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Perkebunan No. 38 Tahun 1995 tentang pelarangan membakar hutan.



Peraturan ini sebagai respon terhadap pembukaan lahan baru (bertujuan perluasan area perkebunan kelapa sawit) dengan cara menebang hutan dan membakarnya.

Pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan pada dasarnya merugikan bersama. Hutan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, baik yang berupa aspek ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, perlu pemikiran dan upaya bersama untuk mengurangi dampak lingkungan yang lebih luas. Peran masyarakat perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kelapa sawit. Pemikiran dan upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit dimulai dengan *replanting* yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan ekologi lahan dan pertumbuhan kelapa sawit yang sedang berkembang.

Fokus program *replanting* kebun kelapa sawit adalah tanaman milik petani mandiri yang telah berumur di atas 25 tahun. Ada sebanyak 4,3 juta hektar kelapa sawit rakyat yang akan dilakukan peremajaan secara bertahap. Program peremajaan lahan kebun sawit untuk tahun 2016 sudah mulai dilaksanakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pembiayaan *replanting* perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau belum sepenuhnya tersedia dengan baik. Luas lahan yang perlu *replanting* sebanyak 5.000 hektare sedangkan rencana penganggaran yang tersedia hanya sebanyak 2.400 hektare dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS, 2017).

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui *replanting*

Kontribusi di atas menjadi pertimbangan masyarakat untuk melanjutkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit yang telah berumur 25 tahun dilakukan *replanting*. Masyarakat dalam *replanting* sebagai upaya melanjutkan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan paling tidak memenuhi tiga prinsip utama yaitu: a. melindungi dan memperbaiki lingkungan alam (*environmentally sound*); b. Laik secara ekonomi (*economically viable*); c. Diterima secara sosial (*socially accepted*) (Kurniawan, 2012).

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dimulai pembukaan lahan baru dan penunbangan tanaman lama (*replanting*). Tahap-tahap *replanting* sebagai berikut: penunbangan tanaman lama; pencacahan batang dan cabang; pemupukan lahan; penanaman tumbuhan penutup tanah; pemancangan lahan; pelaksanaan konservasi tanah; pembuatan lubang tanam; penanaman bibit.

Keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan *replanting*

Keberdayaan masyarakat dapat dilihat pada kemampuannya mengambil keputusan. Baik keputusan perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaan *replanting*. Keberhasilan berdayakan masyarakat dalam legalitas kepemilikan lahan dan penyediaan dana juga menjadi indikator penting. Selain itu, masyarakat mampu melihat potensi dirinya dalam memanfaatkan usaha di masa depan. Keberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan: (1) kemampuan dalam pengambilan keputusan; (2) Kemandirian; dan (3) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan. Faktor pemberdayaan masyarakat dipengaruhi kemampuan pelaku pemberdayaan dan tingkat partisipasinya. Kemampuan pelaku pemberdayaan terdiri dari (1) pengetahuan /kognitif; (2) sikap/afektif dan ; (3) keterampilan/psikomotorik (Wijayanti, 2011).

Pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan *replanting* adalah pengetahuan dalam pembukaan lahan kelapa sawit baru sesuai prinsip ISPO yaitu: a. Tersedia SOP/ prosedur atau prosedur teknis pembukaan lahan baru kelapa sawit; b. Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan memperhatikan konservasi lahan; c. Sebelum pembukaan lahan dilakukan, pelaku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan AMDAL; d. Lahan tidak ditanami dengan kemiringan < 30%, lahan gambut dengan kedalaman < 3 meter dan lahan perannya lebih dari 70%; lahan adat, sumber air, situs sejarah dan sebagainya tetap dijaga kelestariannya; e. Untuk pembukaan lahan gambut hanya dilakukan pada lahan kawasan



Budidaya dengan ketebalan gambut 3 meter, kematangan *saprik* (matang) dan *hemik* (setengah matang) dan di bawah gambut bukan merupakan lapisan pasir kuarsa atau lapisan tanah sulfat asam serta mengatur drainase untuk mengurangi emisi gas rumah kaca; Khusus untuk lahan gambut harus dibangun sistem tata air (*water management*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pembuatan sarana jalan, terasering, rorak, penanaman tanaman penutup tanah dalam rangka konservasi lahan; h. Tersedianya rencana kerja tahunan (RKT) pembukaan lahan baru; i. Kegiatan pembukaan secara terdokumentasi (dan pernyataan pelaku usaha bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa bahan bakar).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pembangunan yang semula berpusat pada pertumbuhan ekonomi kemudian juga mempertimbangkan aspek sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “berpusat pada masyarakat (*people centered*), partisipasi (*participatory*), pemberdayaan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*)” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

Sedangkan tingkat partisipasi adalah proses bagaimana masyarakat berdaya dan terlibat dalam kegiatan bersama untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diwujudkan melalui partisipasi, transfer kekuasaan dan perbaikan kualitas hidup (Zainuri, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Yan dkk. 2005. Kelapa Sawit Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisa Usaha dan Pemasaran: PT. Penebar Swadaya.
- Kurniawan, Wawan, 2012. Urgensi Pembangunan Agroindustri Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mengurangi pemanasan global. Jurnal Teknik Industri, Vol.1 No. 1 ISSN: 1411-6340, Hal: 74-83. Jakarta, Maret 2012
- I. 2010. *Panduan lengkap Kelapa sawit. Managemen Agribisnis dari hulu hingga hilir*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- I. 2015. *Panduan Teknis Budidaya Kelapa sawit. Untuk Praktisi Perkebunan*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- adi at.al. 2010. Hubungan antara Beberapa Karakteristik Fisik Lahan dan Produksi Kelapa Sawit. Akta Agrosia Vol. 13 No.1 hlm 35 - 39 Jan - Jun 2010. ISSN 1410-3354. Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- an Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/ KB.330/5/2016
- olon at. Al., 2013. Kontribusi Kebun Plasma Terhadap Keuntungan Kebun Ngabang PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero). Jurnal Sosial Economic of Agriculture, Volume 2, Nomor 2, Desember 2013, Halaman 68-74.
- anti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 12 Nomor 1, Juni 2011, Hal 15-27. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Semarang.
- Perkebunan Provinsi Riau, 2011.
- gapki.id/perkebunan-kelapa-sawit-dalam-fenomena-kebakaran-hutan-dan-lahan/
/n.tabloidsinartani.com/index.php?id=148&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3430&cHash=3a180cac1d0c9726e734c0c62e3fcc32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, penerjemahan, dan/atau untuk keperluan lain yang tidak merugikan hak-hak cipta.

b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial, termasuk untuk tujuan promosi atau iklan.

2. Dilarang mengumumikan atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk atau dengan bentuk apapun.

